

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan kedaulatan Malvinas masih terus ada kendati kedua negara yang terlibat yakni Inggris dan Argentina sudah memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik sejak tahun 1992 pasca perang Falkland yang berakhir dengan kemenangan Inggris pada tahun 1982. Pada tahun 2009, persoalan kedaulatan kepulauan Malvinas kembali memanas. Pemerintah Argentina mengajak pihak Inggris untuk menegosiasikan persoalan ini. Inggris menolak ajakan presiden Christina Fernandez de Kirchner untuk menegosiasikan kedaulatan Malvinas (Anon., 2015). Tensi semakin meningkat ketika kelompok eksplorasi Inggris, Desire Petroleum, yang beranggotakan wakil-wakil perusahaan minyak seperti Rockhopper Exploration, Falklands Oil & Gas, dan Borders and Southern, mulai melakukan eksplorasi minyak di dekat perairan Malvinas pada bulan Februari 2010 (Bowers, 2010). Argentina menetapkan aturan bahwa setiap kapal yang melewati perairan Malvinas harus mendapat izin dari Argentina.

Di tahun 2011 Argentina mencoba meningkatkan tekanan dengan mencari dukungan dari anggota *South American Trading Bloc Mercosur*. Argentina meminta negara-negara ini untuk menutup pelabuhan mereka terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera Falkland. Respon keras Inggris terlihat dari pengiriman kapal penghancur terbarunya HMS Dauntless ke Atlantik Selatan untuk memantau pantai Malvinas. Argentina kemudian melayangkan protes ke

PBB, menyatakan bahwa Inggris melakukan upaya militerisasi di zona ini. Pada Bulan Juni 2012, Argentina kembali mengajak Inggris ke ruang negosiasi, tetapi perdana menteri David Cameron menolaknya (BBC, 2012).

Peta I.1. Peta Kepulauan Falkland dan Argentina



Peta I.2. Peta Kepulauan Falkland, Inggris, dan Argentina



Untuk meredakan upaya klaim Argentina, pada tanggal 11 dan 12 Maret 2013, Inggris mengadakan referendum untuk mengetahui kehendak rakyat Malvinas, dengan pertanyaan apakah mereka masih ingin menjadi bagian dari Inggris atau tidak. Referendum diikuti oleh 1.517 pemilih hak suara. Dari 1.516 suara sah, 1.513 (99,8%) memilih “ya”, dan 3 (0,2%) memilih “tidak” (falklands.gov, 2013). Berdasarkan hasil referendum, didapatkan fakta bahwa masyarakat Malvinas masih ingin menjadi bagian dari Inggris. Hal ini memperkuat posisi Inggris yang menyatakan bahwa Malvinas adalah bagian dari kedaulatannya dan sebagaimana sejak perang Falkland 1982, tetap menyatakan tidak ada negosiasi bilateral yang perlu dilakukan dengan Argentina. Presiden Argentina, Christina Kirchner menolak hasil referendum dengan alasan bahwa masyarakat Falkland/Malvinas yang mengikuti referendum adalah sebuah populasi “implan” Inggris, dan tidak ada *legal framework* terhadap hal ini (Watts & Goni, 2013). Argentina tetap pada posisinya, ingin mengadakan negosiasi bilateral dengan Inggris tentang masa depan kedaulatan kepulauan Malvinas.

Sesaat setelah hasil referendum diumumkan, juru bicara *Departement of State* Amerika Serikat, Victoria Nuland, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan Inggris, sekutu utamanya itu. Pada tanggal 12 Maret 2013, dalam *daily press briefing*, Victoria menyatakan bahwa Amerika Serikat mengakui secara *de facto* pemerintah Inggris di Malvinas, tetapi tidak mengambil posisi dalam klaim kedaulatan. Lebih jauh, disebutkan bahwa Amerika Serikat mendorong kedua belah pihak untuk berfokus terhadap penyelesaian bilateral (Nuland, 2013).

*“As I said, conflicting claims, but we recognize the de facto U.K. Administration of the islands. We don’t take any position on sovereignty claims. We do think it’s important for the parties to continue to have – to be constructive in their approach and focus their own efforts on a resolution”* (U.S. Department of State Daily Press Briefing, 2013)

Dalam laporan komite hubungan luar negeri Inggris dituliskan bahwa Inggris kecewa dengan sikap yang diambil oleh Amerika Serikat ini (House of Commons Foreign Affairs Committee, 2014). Amerika Serikat dianggap tidak memberikan prioritas pada *self-determination* masyarakat Falkland yang telah menunjukkan keinginannya untuk tetap berada dalam kedaulatan Inggris melalui referendum yang demokratis. Padahal, demokrasi menjadi dasar pembentukan negara Amerika Serikat dan merupakan paham yang diagungkan serta diperjuangkan oleh negara ini. Di dalam laporan itu tertulis :

*“We are dissappointed that the US administration fails to give priority to the principle of self-determination in its position on sovereignty of the Malvinas Islands”* (House of Commons Foreign Affairs Committee, 2014)

Dari pernyataan ini terlihat bahwa sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat tidak sesuai dengan harapan Inggris. Sikap ini bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat pada masa perang Falkland yang berakhir dengan kemenangan Inggris. Kendati pada awalnya bersikap netral, pada tanggal 30 April 1982 Presiden Ronald Reagan mengumumkan akhir dari netralitas Amerika Serikat secara formal (Dumbrell, 2006). Reagan menyalahkan

Argentina atas kegagalan mediasi dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan materi kepada Inggris (Dumbrell, 2006).

Dukungan Amerika Serikat terhadap Inggris di era perang Falkland merupakan manifestasi kedekatan hubungan kedua negara yang seringkali disebut dengan istilah *Special Relationship*. Frasa ini pertama kali dikemukakan oleh Winston Churchill dalam pidatonya pada tahun 1946 di Westminster College Missouri yang kemudian juga dikenal sebagai pidato *Iron Curtain*. *Special relationship* memiliki suprastruktur politis dan ideologis, dan substruktur militer dan intelegen yang melekat (Wallace & Phillips, 2009). Pada masa perang Falkland, tercatat bahwa pendukung Inggris di kongres yang dipimpin senator Joe Biden mengatakan “*don’t mind all this crap about self-determination, we’re with you because you’re British*” (Dumbrell, 2006).

Hubungan ini merupakan sebuah hubungan mutualistik antar kedua negara yang terjalin sejak perang dunia II. Di era perang dingin, Inggris merupakan rekan Amerika Serikat untuk membendung komunisme di kawasan Eropa. Kepemimpinan Inggris di NATO menunjukkan arti penting Inggris bagi Amerika Serikat. Intensi Inggris untuk menjaga hubungan baiknya dengan Amerika Serikat pasca perang dingin terlihat dari dukungan yang diberikan dalam perang Afganistan dan Iraq. Inggris merupakan pemberi dukungan terbesar dalam kedua perang Amerika Serikat tersebut dengan nilai total lebih dari 20 milyar Euro (BBC, 2010).

Pada tahun 1946, PBB menetapkan Kepulauan Malvinas sebagai sebuah *Non-Self-Governing Territory* (United Nations, t.thn.). Dalam *Chapter 11* Piagam



PBB dituliskan bahwa penduduk dari semua *Non-Self-Governing Territories* memiliki hak atas *self-determination*. *Self-determination* dalam konteks ini dapat dipahami sebagai penentuan status politik masa depan atas sebuah unit teritori oleh masyarakatnya sendiri. Dalam kasus ini, masyarakat Falkland memilih untuk menjadi wilayah *Self-Govern* yang tidak sepenuhnya independen sebagai bagian dari *British overseas territory*. Coffey (2013) mengatakan “*it is embarrassing to think that President Obama, the leader of the free world, will not back such a fundamental right*”. Amerika Serikat sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seharusnya menghormati hak *self-determination* penduduk Malvinas sebagai hak yang fundamental.

Posisi yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap hasil referendum Malvinas ini menuai kritik. Sebagaimana dikutip oleh dailysignal.com, Luke Coffey, seorang warga negara Amerika Serikat mantan penasehat Liam Fox ketika dirinya menjabat sebagai *United Kingdom Secretary of State for Defense* mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat ini sebagai kebijakan yang tidak bijak (Coffey, 2014). Dirinya menambahkan bahwa *Self-determination* merupakan sebuah hak fundamental dan sangat berkaitan dengan hak asasi manusia lain seperti kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan dari kekuatan arbitrari (Coffey, 2014).

Dengan tidak mengambil sikap tegas atas kedaulatan Malvinas, Amerika Serikat sudah mempertaruhkan kepentingan nasionalnya yang melekat pada hubungan bilateralnya dengan Inggris. Amerika Serikat tidak mendukung Inggris sebagai sekutunya kendati Inggris sudah memenangkan referendum yang

demokratis. Padahal, Amerika Serikat dan Inggris memiliki kedekatan hubungan bilateral yang dikenal dengan istilah *Special Relationship*. Amerika Serikat tidak mendukung kehendak penduduk Malvinas untuk tetap berada di bawah naungan Inggris. Amerika Serikat justru memilih bersikap netral terhadap klaim kedaulatan Inggris atas Malvinas yang didasarkan pada hasil referendum yang demokratis. Dengan demikian, tentu ada pertimbangan tertentu dibalik kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menyikapi referendum Malvinas.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah : Mengapa Amerika Serikat tidak mendukung Inggris dalam sengketa kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas kendati Inggris sudah memenangkan referendum?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Amerika Serikat tidak mendukung Inggris dalam sengketa kedaulatan Kepulauan Malvinas kendati Inggris sudah memenangkan referendum.

## **I.4. Landasan Pemikiran**

Dengan memilih sikap netral pasca kemenangan Inggris dalam referendum, Amerika Serikat sudah membahayakan hubungannya dengan sekutu utamanya itu. Sikap yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap kasus ini tentu bukan tanpa sebab. Dalam perspektif realisme, para penstudi hubungan internasional sepakat bahwa perilaku negara selalu dipengaruhi oleh kepentingan

nasionalnya. Kepentingan nasional juga menjadi dasar bagi setiap negara dalam berhubungan dengan negara–negara lain dalam sistem dunia yang anarki. Oleh karena itu, untuk dapat memahami alasan dibalik kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap hasil referendum Malvinas, perlu dilakukan analisis terhadap kepentingan Amerika Serikat dalam kasus ini dan sejauhmana kepentingan tersebut dapat mendorong dikeluarkannya kebijakan luar negeri tersebut.

Kepentingan nasional adalah kepentingan suatu negara sebagai sebuah kesatuan untuk menjadi entitas merdeka terpisahkan dari kepentingan wilayah sub-ordinat atau kelompok–kelompok serta negara lain atau kelompok supranasional. (Morgenthau, 1948). Kepentingan nasional juga dapat dipahami sebagai kebutuhan dan keinginan dari sebuah negara bangsa dalam hubungannya dengan negara berdaulat lain di lingkungan luar (Nuechterlein, 1976). Untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat terhadap kasus ini, diperlukan analisis mengenai hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Inggris dan Argentina.

Hubungan *special relationship* antara Amerika Serikat dan Inggris dalam kaitannya dengan sengketa kedaulatan Falkland/Malvinas dapat dilihat melalui teori aliansi dalam dunia unipolar yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt (2009). Menurut teori aliansi dalam dunia unipolar yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt (2009), unipolaritas kekuatan dunia pasca perang dingin menghadirkan suatu struktur baru baru dalam pola hubungan antar negara di dunia. Negara – negara di dunia sangat sulit mengimbangi kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan hagemon. Negara -negara ini hanya memiliki 3 pilihan dalam situasi ini, yakni (1) mengurangi pengaruh negara hagemon dengan



membentuk aliansi dengan negara lain, (2) bersekutu dengan negara hagemon untuk mendukung aksi – aksinya atau mengeksploitasi kekuatannya demi kepentingan negara itu sendiri, dan (3) tetap netral (Walt, 2009).

Unipolaritas dunia memberikan freedom of action atau kebebasan bagi hagemon dalam bertindak tanpa adanya ketakutan atas dari reaksi negara–negara lain yang berkekuatan lebih kecil. Sebaliknya, justru negara–negara tersebut yang harus khawatir akan dampak yang ditimbulkan dari setiap aksi negara hagemon. Ketika suatu negara memutuskan untuk bersekutu dengan negara hagemon dan menggunakan kekuatannya hagemoninya, negara ini harus membuktikan arti pentingnya bagi pemenuhan kepentingan kekuatan hagemon.

Teori hubungan intensitas kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dari Donald E. Nuechterlein dapat digunakan untuk melihat kepentingan Amerika Serikat terhadap kasus ini melalui hubungannya dengan Argentina. Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri, Nuechterlein (1976) mengidentifikasi adanya empat jenis kepentingan nasional dasar yang dimiliki oleh setiap negara yakni (1) kepentingan pertahanan (*defence interest*), (2) kepentingan ekonomi (*economic interest*), (3) kepentingan tatanan dunia (*world order interest*), dan (4) kepentingan ideologis (*ideological interest*). Kepentingan pertahanan adalah tentang perlindungan terhadap negara bangsa dan penduduknya dari ancaman kekerasan dari negara lain, termasuk ancaman terhadap sistem pemerintahan. Kepentingan ekonomi berhubungan dengan peningkatan ekonomi negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kepentingan tatanan dunia berhubungan dengan upaya mempertahankan sistem politik dan ekonomi yang membuat sebuah negara

bangsa merasa aman dimana penduduk dan perdagangan di luar batas negara dapat berjalan dengan aman. Kepentingan ideologis adalah mengenai perlindungan dan kemajuan kumpulan nilai yang dimiliki negara bangsa dan dipercaya sebagai sesuatu yang baik secara universal.

Keempat kepentingan nasional dasar yang telah disebutkan diatas dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan menurut intensitasnya masing-masing dalam sebuah isu. Berdasarkan intensitas kepentingan, isu internasional dapat dibedakan menjadi *survival issues*, *vital issues*, *major issues*, dan *Peripheral issues* (Nuechterlein, 1976). *Survival issues* adalah isu-isu yang berhubungan dengan eksistensi negara bangsa. Isu ini selalu berkaitan dengan isu-isu pertahanan yang dicirikan dengan adanya ancaman kekerasan fisik dari negara lain. *Vital issues* adalah isu-isu dimana kerugian serius akan terjadi apabila negara tidak berupaya melakukan tindakan-tindakan berdasarkan perhitungan yang matang. Faktor pembeda antara *vital issues* dengan *survival issues* adalah adanya waktu yang lebih panjang untuk mencari bantuan dari sekutunya ataupun melakukan *bargaining* dengan pihak lawan. *Major issues* adalah isu-isu yang berpotensi menjadi *vital issues*, tetapi kemunculannya masih dapat dicegah dengan langkah-langkah korektif. *Pheriperal issue* adalah isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan negara, tetapi berhubungan dengan penduduk secara privat ataupun perusahaan yang beroperasi dalam sebuah negara.

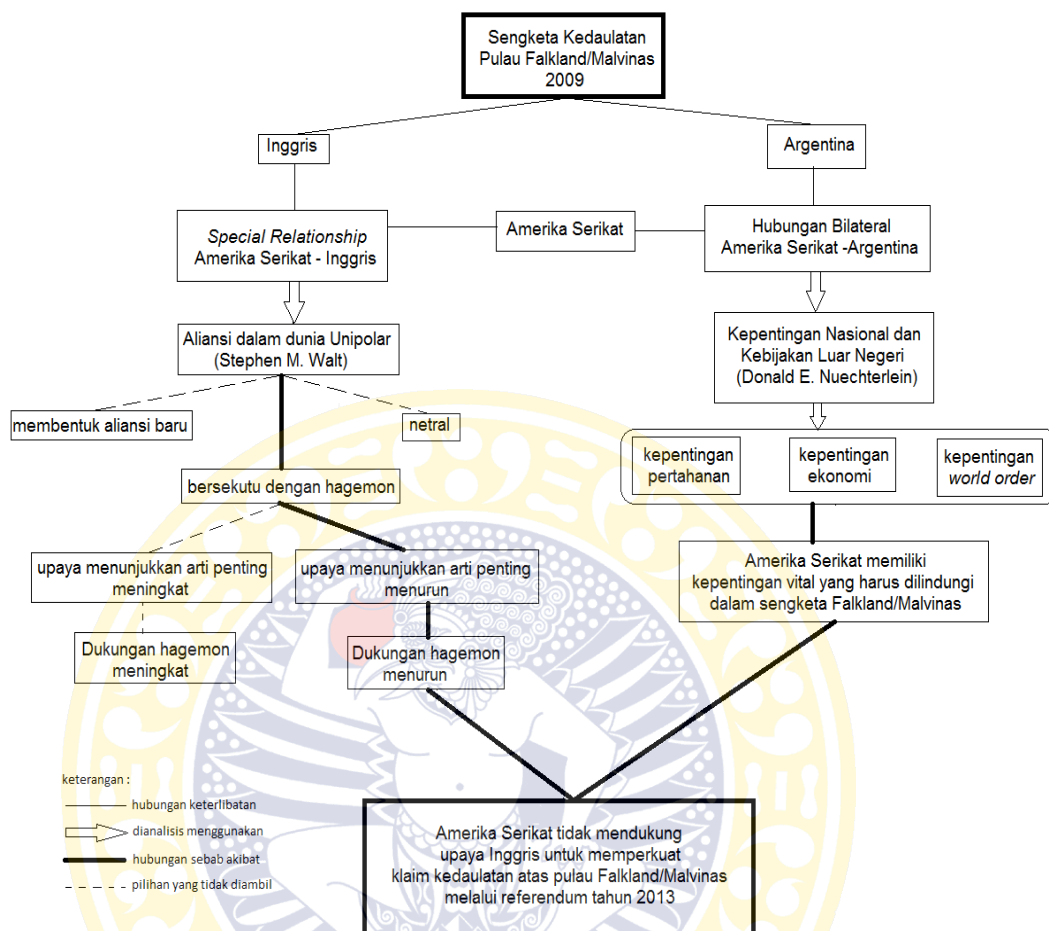
Tabel I.1. Tabel Teori Nuechterlein

Basic Interest involved	Intensity of interest			
	Survival	Vital	Major	Peripheral
Defence				
Economic				
World order				
Ideological				

Tabel I.1 menunjukkan model tabel identifikasi intensitas kepentingan yang dikemukakan oleh Nuechterlein (1976). Ia menggunakan model ini untuk menganalisis hubungan antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri. Tingginya intensitas isu yang berhubungan dengan kepentingan internasional dapat menyebabkan sebuah negara melakukan pengaturan terhadap kebijakan luar negerinya. Melalui model analisis ini akan dapat diketahui intensitas kepentingan Amerika Serikat terhadap sengketa kepulauan Malvinas dalam hubungannya dengan Argentina.

Sebuah kesimpulan dapat ditarik setelah mengetahui hubungan aliansi Amerika Serikat dengan Inggris dan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Argentina. Alur berpikir dan penarikan kesimpulan dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar I.3. Visualisasi Pemikiran



### I.5. Hipotesis

Berdasarkan landasan pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dihadirkan adalah Amerika Serikat tidak mendukung Inggris sebagai sekutu utamanya kedaulatan dalam sengketa kedaulatan Falkland/Malvinas kendati Inggris telah memenangkan referendum karena :

1. Pada periode memanasnya sengketa kedaulatan Falkland/Malvinas, Inggris sebagai sekutu utama Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang menurunkan arti penting Inggris bagi Amerika Serikat

2. Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional vital yang harus dijaga dalam hubungannya dengan Argentina

## **I.6. Metodologi Penelitian**

### **I.6.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

#### **I.6.1.1. Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri sendiri dapat dipahami sebagai keseluruhan kebijakan suatu negara terhadap dan interaksi – interaksi dengan lingkungan di luar batas – batas wilayahnya (Breuning, 2007). Rasionalitas perumusan kebijakan luar negeri dapat diperoleh dengan menggunakan *game theory*. Teori ini menyebutkan bahwa pilihan kebijakan yang diambil adalah pilihan dengan keuntungan terbesar dan kerugian terkecil dalam kondisi ketidakpastian dan informasi tidak lengkap (Tema, 2014).

#### **I.6.1.2. Kepentingan Nasional**

Kepentingan Nasional merupakan dasar dan tujuan berdirinya sebuah negara bangsa. Penstudi HI dari aliran realisme percaya bahwa dalam setiap negara selalu mendasarkan setiap perilakunya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi dasar bagi setiap negara untuk menentukan prioritas pilihan yang harus diambil dalam situasi keterbatasan sumber daya.

Kepentingan nasional dapat dipahami sebagai kebutuhan dan keinginan dari sebuah negara bangsa dalam hubungannya dengan negara berdaulat lain di lingkungan luar (Nuechterlein, 1976). Kepentingan nasional dasar dari suatu



negara dapat dibedakan menjadi empat yakni kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan memelihara tatanan dunia atau *world order*, dan ideologi.

Untuk melihat keberadaan dan intensitas kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap sengketa kedaulatan kepulauan Malvinas, akan digunakan teori Nuechterlein (1976) tentang hubungan antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri. Seperti telah disebutkan sebelumnya, intensitas kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi empat tingkat, yakni *survival*, *vital*, *major*, dan *pheriperal*. Intensitas kepentingan nasional menjadi dasar bagi suatu negara untuk merumuskan kebijakan luar negerinya. Semakin tinggi intensitas kepentingan, semakin besar pula upaya yang akan dilakukan suatu negara untuk memenuhinya.

### **I.6.1.3. Hubungan Bilateral**

Hubungan bilateral yang dimaksudkan disini adalah hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Inggris, dan hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Argentina. Analisis terhadap hubungan bilateral ini akan dilakukan dengan menggunakan teori aliansi dalam dunia unipolar dari Stephen M. Walt (2009). Hubungan Amerika Serikat – Inggris akan dianalisis dari bagaimana kedua negara memaknai *special relationship* yang telah disepakati. Analisis Hubungan Amerika Serikat – Argentina berangkat dari status *Major Non-NATO Ally* yang diberikan Amerika Serikat terhadap Argentina.

### **I.6.2. Tipe Penelitian**

Berdasarkan klasifikasi tipe penelitian yang dikemukakan oleh Robert Pojasek (2005), maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian eksplanatif. (explanatory research). Penelitian ini mencoba melihat hubungan – hubungan antar variabel dengan menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penyebab dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri dengan menggunakan pendekatan kepentingan nasional.

### **I.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data – data sekunder yang didapatkan melalui proses tinjauan literatur. Menurut Rossel dan Spray (2007), tinjauan literatur dapat dipahami sebagai proses membaca dan meninjau pengetahuan yang telah dipublikasikan pada suatu media. Pengetahuan yang sudah ada dalam konsteks ini juga merujuk pada hasil – hasil penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini dilakukan untuk menemukan data atau teori yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan penulis antara lain adalah buku, skripsi, berita online, surat kabar, dokumen terbitan resmi pemerintah, dan sumber – sumber lain yang sesuai.

#### **I.6.4. Teknik Analisis Data**

Penelitian dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Data – data sekunder yang telah diperoleh akan dikumpulkan untuk diverifikasi, dianalisis, dan kemudian dihubungkan dengan variabel – variabel yang berkaitan dengan kerangka pemikiran yang ada.

#### **I.6.5. Jangkauan penelitian**

Batasan Jangkauan penelitian adalah tahun 1991 hingga tahun 2013. Sejak tahun 1991, Inggris memainkan peran baru dalam hubungannya dengan Amerika Serikat seiring dengan keruntuhan Uni Soviet sebagai musuh bersama. Tahun 1991 juga merupakan tahun awal diterapkannya kebijakan ekonomi liberal dan privatisasi di Argentina.

#### **I.6.6. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan : Bab ini merupakan bentuk penyampaian pendahuluan penelitian yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, perumusan kerangka berpikir, dan metodologi penelitian.

Bab II Melemahnya *Special Relationship* Amerika Serikat – Inggris : Bab ini berisikan pemaparan mengenai pola hubungan khusus atau *special relationship* yang dibangun oleh Amerika Serikat dan Inggris. Pola hubungan ini menjadi dasar penentuan intensitas kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Inggris.

Bab III Kepentingan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Argentina : Di dalam Bab ini akan disajikan analisis terhadap pola hubungan yang

dibangun oleh Amerika Serikat dan Argentina. Dasar pembentukan hubungan akan menjadi bahan analisis terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Argentina

Bab IV Analisis : Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab II dan bab III. Analisis akan dilakukan menggunakan kerangka pemikiran yang telah disusun pada bab I.

Bab V Penutup : Berisikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian bab II, III, dan IV. Sebuah kesimpulan akan ditarik dari hasil analisis untuk kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan. Dengan melihat konstelasi hubungan Amerika Serikat dengan Inggris dan Argentina akan diperoleh fakta – fakta yang menjadi acuan penentuan intensitas kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap sengketa Falkland/Malvinas.